

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan

1. Pengertian Pembangunan

Pembangunan menurut Siagian (2003:4), didefinisikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Pembangunan yang merupakan tujuan dari dilaksanakannya perencanaan pembangunan, memiliki pengertian sebagai usaha untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik sehingga akan tercipta kesejahteraan masyarakat. Menurut Kartasasmita (1996:2) pembangunan diartikan sebagai suatu perubahan ke arah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pembangunan daerah sangat bertumpu pada kemampuan pemerintah setempat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat setempat. Kesemuanya ditujukan kepada usaha membina bangsa yang terus menerus dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan sebelumnya. Pembangunan merupakan suatu upaya untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik dari kondisi yang ada pada saat ini, mencapai maksud tersebut sudah barang tentu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi (Suryono, 2004:37).

Jadi menurut beberapa pengertian mengenai pembangunan diatas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah keseluruhan proses pelaksanaan

kebijakan yang dilakukan oleh suatu bangsa secara sadar dan terencana dalam usaha mencapai perubahan untuk menuju modernitas dan kesejahteraan yang lebih baik suatu bangsa.

2. Paradigma Pembangunan

Dalam perkembangannya, pembangunan bangsa-bangsa di dunia mengalami beberapa pergeseran pola atau paradigma pembangunan. Paradigma pembangunan tersebut adalah:

a. Paradigma Pertumbuhan (*Growth Paradigm*)

Sulistiyani dalam Agus dan Trilaksono (2008:11) konsep paradigma pertumbuhan adalah:

“Konsep paradigma pertumbuhan (*Growth Paradigma*) merupakan asas pemikiran yang memperjuangkan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan negara untuk mengejar ketertinggalan. Sasaran utama dari paradigma pertumbuhan adalah menciptakan kondisi masyarakat dan negara yang lebih baik dengan mengusahakan adanya peningkatan pendapatan masyarakat dan Negara” (Sulistiyani, 2004:43).

Pemerintah Indonesia dan negara sedang berkembang lainnya (seperti Malaysia) telah menerapkan paradigma pertumbuhan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas, dan pemerataan pendapatan (Sulistiyani, 2004:44). Tidak dapat dipungkiri bahwa pendekatan ini telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, walaupun belum mampu mengatasi masalah kemiskinan secara tuntas. Menurut Sulistiyani (2004:43), di sisi lain paradigma pertumbuhan ini mengandung eksternalitas negatif yang tidak diharapkan yaitu jurang pemisah yang cukup lebar antara si kaya dan si miskin.

b. Paradigma Pembangunan Berkelanjutan (*Sustained Development Paradigm*)

Adanya kenyataan bahwa hasil-hasil pembangunan tidak dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat telah mengondisikan ketimpangan dan ketergantungan. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan paradigma baru yaitu paradigma pembangunan berkelanjutan (Sulistiyani, 2004:63).

Sementara itu, Sulistiyani dalam Agus dan Trilaksono (2008:12) menjelaskan bahwa:

“Paradigma pembangunan berkelanjutan menawarkan konsep pembangunan yang bersifat ramah lingkungan, yang pada dasarnya pembangunan hendaknya memerhatikan masalah sumber daya yang bersifat *renewable/non-renewable*. Dengan demikian, pemakaian segenap potensi dan studi pembangunan akan disertai kebijakan pemeliharaan dan pemulihannya” (Sulistiyani, 2004:63).

c. Paradigma Pembangunan Manusia (*People Center Development Paradigm*)

Belajar dari kegagalan maka pendekatan pembangunan menggunakan paradigma baru yang lebih humanis, yaitu pendekatan pembangunan yang memerhatikan lingkungan dan pembangunan berwajah manusiawi. Pendekatan ini memprioritaskan pembangunan sosial dan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan dengan strategi *sustainable development*. Pembangunan berpihak kepada rakyat, bukan elite penguasa. Dengan demikian

konsentrasi pembangunan lebih pada ekonomi kerakyatan dengan mengedepankan fasilitas pembangunan usaha kaum lemah.

Menurut Agus dan Trilaksono (2008:13) menjelaskan bahwa:

“Pembangunan yang berbasis manusia mencakup pembangunan masyarakat (*community based development*) dan pembangunan manusia (*people centered development*). Paradigma kemanusiaan ini berusaha mengangkat martabat manusia sebagaimana mestinya sebagai makhluk yang memiliki harga diri, kemampuan inteligensi, dan perasaan. Manusia tidak dapat disamakan dengan alat produksi untuk melipatgandakan hasil semata, hendaknya manusia dihargai dan dihormati dengan cara meningkatkan kualitas SDM sehingga menempatkan manusia pada martabat yang lebih baik”.

d. Paradigma Pemberdayaan Masyarakat (*Public Empowerment Paradigm*)

Perkembangan paradigma *people centered development* atau paradigma yang berorientasi pada manusia (*humanizing*) didahului dengan pengembalian pada konsep ekonomi yang memberdayakan masyarakat miskin (neo ekonomi), yang kemudian berkembang ke arah paradigma strukturalis melalui pandangan terhadap kepedulian masyarakat melalui teori-teori ketergantungan (Suprpto, 2000:78).

Berdasarkan beberapa paradigma pembangunan di atas, pembangunan cenderung mengarah kepada permasalahan ekonomi yang selanjutnya mengakibatkan kemiskinan masyarakat. Sehingga diperlukan sebuah kerjasama antara tiga elemen, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Tipe-Tipe Pembangunan

Menurut Suryono (2004:21-22) ada 8 tipe di dalam pembangunan diantaranya:

- a. Tipe ideal, tipe ini merupakan ciri perencanaan pembangunan yang mampu mengendalikan pertumbuhan dan perubahan sistem.
- b. Tipe menghasilkan dalam waktu jangka pendek, tipe ini mampu mengendalikan pertumbuhan tetapi tidak dalam perubahan sistem.
- c. Tipe menghasilkan dalam jangka panjang, tipe perencanaan pembangunan yang mampu mengendalikan perubahan sistem tetapi tidak dalam pertumbuhan.
- d. Tipe kegagalan, tipe ini ditandai adanya perencanaan namun tidak mampu mengendalikan baik pertumbuhan maupun perubahan sistem.
- e. Tipe dorongan lingkungan, tipe ini lebih mengutamakan perubahan sistem dan mengabaikan pentingnya perencanaan dan pertumbuhan.
- f. Tipe pragmatis, tipe ini lebih mengutamakan adanya pertumbuhan dan perubahan sistem tetapi, tetapi mengabaikan pentingnya perencanaan.
- g. Tipe krisis, tipe pembangunan yang lebih mengutamakan tingkat pertumbuhan dan mengabaikan pentingnya perencanaan dan perubahan sistem.
- h. Tipe masyarakat statis, tipe ini mengabaikan semua aspek perencanaan, pertumbuhan maupun perubahan sistem.

Berdasarkan beberapa tipe-tipe pembangunan di atas, dapat diartikan bahwa langkah yang diambil suatu negara dalam menentukan tipe

pembangunannya pada setiap negara tidaklah harus sama, di setiap tipe pembangunan memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri, untuk itu suatu negara harus memperhatikan situasi dan kondisi dirinya berada dalam keadaan seperti apa agar mampu menentukan tipe pembangunan yang tepat dan proses pencapaian tujuan pembangunan berjalan dengan lancar.

4. Unsur-Unsur Pembangunan

Menurut Siagian (2003:4-5) unsur-unsur pembangunan, antara lain:

a. Proses

Pembangunan merupakan suatu proses berarti bahwa pembangunan merupakan suatu kegiatan yang terus-menerus dilaksanakan.

b. Sadar

Pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan.

c. Berencana

Pembangunan dilakukan secara berencana dan terus-menerus serta berorientasi pada masa depan.

d. Pertumbuhan dan perubahan

Suatu negara bangsa yang sedang membangun harus berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan sehingga tidak statis.

e. Modernitas

Pembangunan mengarah pada modernitas, yaitu mengandung arti bahwa pembangunan ditujukan pada cara hidup yang lebih baik

daripada sebelumnya, serta kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan dalam rangka usaha peningkatan swasembada dan mengurangi ketergantungan terhadap pihak lain.

f. **Multidimensional**

Hal ini berarti bahwa modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat multi-dimensional. Modernitas tersebut mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara, terutama aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan administrasi.

g. ***Nation-Building***

Hal ini berarti bahwa semua hal tersebut di atas ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa (*nation building*).

Dari semua hal di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa dalam proses pembangunan haruslah memperhatikan unsur-unsur pembangunan, agar usaha pembinaan bangsa ini mampu memperkokoh pondasi Negara tersebut, menjadi negara yang sejajar dengan negara-negara maju di dunia karena mampu menciptakan situasi yang mampu membuatnya berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara lainnya.

B. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Kata pemberdayaan merupakan terjemahan dari *empowerment*, sedangkan “memberdayakan” adalah terjemahan dari *empower*. Di Eropa, wacana

pemberdayaan muncul ketika industrialisasi menciptakan masyarakat penguasa faktor produksi dan masyarakat pekerja yang dikuasai.

Pengertian pemberdayaan menurut peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM pada bab I ketentuan umum pasal I ayat 8: “Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri”.

a. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suhendra (2006:77) pemberdayaan masyarakat adalah upaya gerakan terus menerus untuk menghasilkan suatu kemandirian (*self propelled development*). Pemberdayaan harus berawal dari kemauan politik (*political will*), para penguasa seperti yang dikemukakan oleh Reonard D. White.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan maupun pelaksanaan keputusan merupakan hal yang sangat penting kaitannya dalam pemantapan, pembudayaan, pengalaman, dan pelaksanaan demokrasi pada suatu negara. Menurut Sewell Coppock (1977), ada dua alasan penting bagi perencanaan pembangunan untuk melibatkan masyarakat dalam menyusun program pembangunan, yaitu alasan intrinsik dan alasan pragmatis (Suhendra, 2006:76). Dalam pengertian ini, secara intrinsik setiap anggota masyarakat berhak untuk mengetahui dan menyampaikan pendapatnya terhadap isu pembangunan, sedangkan secara pragmatis pemerintah selaku perencana dapat menggali aspirasi masyarakat.

Menurut Kartasasmita (Mashoed, 2004:46), pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui tiga aspek pokok, yakni:

- 1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang.
- 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat.
- 3) Melindungi, sehingga proses pemberdayaan harus mencegah yang lemah menjadi semakin lemah akibat kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat.

Adapun unsur-unsur pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah:

- 1) Kemauan politik yang mendukung.
- 2) Suasana kondusif untuk mengembangkan potensi secara menyeluruh.
- 3) Motivasi.
- 4) Potensi masyarakat.
- 5) Peluang yang tersedia.
- 6) Kerelaan mengalihkan wewenang.
- 7) Perlindungan.
- 8) Kesadaran. Dalam Suhendra (2006:87).

Berdasarkan penjelasan di atas, makna pemberdayaan masyarakat, yaitu: (1) meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan agar kondisi kehidupan masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan; (2) meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberian wewenang dalam pengambilan keputusan dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Konsep ini mencerminkan paradigma pembangunan, yakni yang bersifat *“people centered, participatory, empowering and sustainable”* (masyarakat yang terpusat, partisipatif, memberdayakan dan berkelanjutan).

Berdasarkan beberapa pengertian pemberdayaan yang telah disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk mendorong, mengoptimalkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan kemampuannya, kemandiriannya, potensinya, dalam kehidupan ekonomi yang lebih baik.

b. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Menurut Sumodiningrat (1999), pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.

Perubahan struktural yang dimaksud yaitu perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsistem ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian.

Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi:

- 1) Pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya.
- 2) Penguatan kelembagaan.
- 3) Penguasaan teknologi.
- 4) Pemberdayaan sumberdaya manusia.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya

kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup peningkatan akses bantuan modal usaha, peningkatan akses pengembangan SDM, dan peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal. Konsep pemberdayaan masyarakat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, pemberdayaan masyarakat itu sendiri yang meliputi penyadaran/mendorong, individu untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya dalam pencapaian kehidupan yang lebih baik. Sedangkan kedua, yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat yang merupakan usaha pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam membantu mengembangkan usaha atau kelompok usaha dalam peningkatan produktivitas usaha tersebut agar memacu tumbuhnya usaha-usaha baru demi peningkatan ekonomi masyarakat.

2. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dilaksanakan melalui proses yang terarah dan terus menerus dilaksanakan agar tercipta kemandirian masyarakatnya. Dalam proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Pendapat tentang penahapan pemberdayaan tersebut seperti yang diungkapkan oleh Sulistiyani (2004:83), tahap-tahap yang harus dilewati dalam pemberdayaan adalah:

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Tahap ini merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan

menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif.

- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat menggali peran dalam pembangunan.
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan, sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Tahap ini merupakan tahap pengayaan atau peningkatan intelektualitas dan kecakapan-keterampilan yang diperlukan, supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian.

Dalam mengukur apakah proses pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik atau tidak, maka diperlukan suatu indikator untuk mengukurnya. Adapun indikator tersebut menurut Suhendra (2006:86), yaitu: (a) masyarakat mempunyai kemampuan menyiapkan dan menggunakan pranata dan sumber-sumber yang ada di masyarakat; (b) dapat berjalannya "*bottom up planning*", (c) memampukan dan aktivitas ekonomi; (d) kemampuan menyiapkan hari depan keluarga; (e) kemampuan menyampaikan pendapat dan aspirasi tanpa adanya tekanan. Masyarakat yang berdaya akan mampu dan kuat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, mampu mengawasi jalannya pembangunan dan juga menikmati hasil pembangunan.

Dengan demikian proses pemberdayaan masyarakat harus dilakukan dengan secara terus menerus, terarah dan berkesinambungan, serta melibatkan semua pihak dan potensi yang ada. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui tahap penyadaran, tahap transformasi, dan tahap peningkatan kemampuan intelektual individu, yang dimulai dari pemberdayaan individu kemudian berlanjut ke pemberdayaan kelompok. Proses pemberdayaan masyarakat secara berkala dapat dilihat hasilnya dengan adanya indikator yang telah ditentukan sebelumnya agar proses pemberdayaan masyarakat ini berjalan tidak sia-sia bagi perubahan keadaan sosial maupun ekonomi masyarakat.

3. Strategi dan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Strategi dalam pemberdayaan masyarakat adalah berkenaan dengan metode atau cara yang digunakan. Melalui metode yang diupayakan ditemukan cara yang sederhana tetapi terorganisir dan berdaya guna dalam membangkitkan kemauan, kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat agar terlibat aktif dalam kegiatan pemberdayaan.

Parsons *et.al.* (Suharto 2005:66) menjelaskan pemberdayaan masyarakat dalam konteks pekerjaan sosial dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*), yaitu:

a. Aras Mikro

Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan konseling, *strees management*, *crisis intervention*. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*Task Centered Approach*).

b. Aras Mezzo

Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien dengan menggunakan kelompok lain sebagai media intervensi melalui pendidikan dan pelatihan serta dinamika kelompok.

c. Aras Makro

Disebut sebagai strategi sistem besar (*Large System Strategy*) karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas.

Strategi ini memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

Pendekatan pemberdayaan menurut Suharto (2005:67) dapat disingkat menjadi 5 P, yaitu:

a. Pemungkinan:

Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.

b. Penguatan:

Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

c. Perlindungan:

Melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah.

d. Penyokongan:

Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

e. Pemeliharaan:

Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Pendapat lain terkait kebijakan pemberdayaan masyarakat yang strategis mengacu pada tiga ukuran, antara lain (Nugroho, 2009:245):

- a. Pertama, pada tujuan. Di sini kita menangkap bahwa tujuannya adalah *menjadikan rakyat berdaya*. Berdaya artinya mempunyai kemampuan untuk membangun diri sendiri (secara individual maupun berkelompok) tanpa terlalu banyak memerlukan uluran tangan pemerintah.
- b. Kedua, mengacu pada konteks tantangan saat ini dan hari depan.
- c. Ketiga, sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Prinsip ini setara dengan prinsip manajemen, yakni optimalisasi risorsis atau sumber daya.

Dengan demikian, strategi dan pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah haruslah tepat, sehingga strategi dalam pemberdayaan masyarakat dapat menggerakkan kemampuan masyarakat dalam berfikir, bertindak dan terlibat langsung dalam pembangunan. Idealnya dalam proses pemberdayaan dapat terjadi sinergi dari kelompok pemberi dan penerima pemberdayaan itu sendiri.

C. Kemitraan

1. Pengertian Kemitraan

Partnership dalam Hefitah (2003:119) diartikan sebagai perspektif baru yang merupakan penjabaran dari *good governance*. *Partnership* menurut Hefitah hanya dapat berlangsung apabila ada trust (kepercayaan) antar pihak yang terlibat. Pemerintah perlu terlebih dahulu menghilangkan rasa ketidakpercayaan komunitas terhadap dirinya. Tanpa itu, prospek menuju *good governance* sulit dicapai. Dimasa lalu, penyedia infrastruktur, dan pelayanan publik lain merupakan tanggung jawab dari pemerintah semata. Sektor swasta dan komunitas sendiri

tidak banyak terlibat. Sehingga Hefitah mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip kemitraan antara lain:

- a. Kepercayaan atau *trust*.
- b. Kesetaraan atau *equality*.
- c. Kemandirian.

Pengertian kemitraan (*partnership*) dapat dilihat dalam beberapa dimensi.

Dalam dimensi ekonomi, Thoby Mutis mengatakan bahwa kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih manfaat bersama ataupun keuntungan bersama sesuai prinsip saling membutuhkan dan saling mengisi sesuai kesepakatan yang muncul (mutual) (Mutis dalam Setiawan, 2004: 32).

Kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership*, dan berasal dari akar kata *partner*. *Partner* dapat diterjemahkan “pasangan, jodoh, sekutu atau kompanyon”. Sedangkan *partnership* di terjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Bertolak dari pengertian tersebut, maka kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Ada dua pihak atau lebih.
- b. Memiliki kesamaan visi mencapai tujuan.
- c. Ada kesepakatan.
- d. Saling membutuhkan (Sulistiyani, 2004:129).

Tujuan dengan adanya kemitraan ini adalah untuk mencapai hasil yang lebih sempurna, dengan memberikan keuntungan-keuntungan atau manfaat antar

pihak yang bekerjasama (bermitra). Untuk mencapai tujuan tersebut kedua belah pihak harus secara maksimal berkomitmen memberikan hasil kerja yang terbaik agar terjalin hubungan yang saling menguntungkan (mutualisme).

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kemitraan merupakan sebuah proses kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang mempunyai kesamaan visi mencapai tujuan, dan disini pihak-pihak tersebut saling percaya, sehingga diperoleh kesepakatan dalam bekerjasama untuk saling menguntungkan.

2. Model-model Kemitraan

Kemitraan dapat dilakukan oleh suatu pihak perseorangan, kelompok, dan juga badan hukum. Pihak-pihak yang terkait dapat memiliki status yang setara atau subordinate, memiliki kesamaan misi atau misi berbeda tetapi saling mengisi/melengkapi secara fungsional. Berikut adalah model-model kemitraan menurut Sulistiyani (2004:130):

- a. Model kemitraan yang bertolak dari pemahaman akan dunia organisme:

- 1) Kemitraan Semu (*Pseudo Partnership*)

Merupakan persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan lainnya. Model kemitraan ini tampak nyata pada pola pembangunan di masa orde baru yang dulu digemborkan slogan “pembangunan dari dan oleh pemerintah untuk

rakyat”. Rakyat yang berposisi sebagai mitra kerja pemerintah sesungguhnya tidak mengetahui apa makna atas semua itu.

2) Kemitraan Mutualistik (*Mutualism Partnership*)

Merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapat manfaat lebih, saling menguntungkan, sehingga akan dapat mencapai tujuan secara optimal.

3) Kemitraan Konjugasi (*Conjugation Partnership*)

Kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan “*paramecium*”. Dua *paramecium* melakukan konjugasi untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pemebelahan diri. Jadi, dua pihak yang bermitra di sini dapat melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing.

Berdasarkan model-model kemitraan diatas, melihat kondisi kemitraan antara Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) Kelurahan Manguharjo dengan UMKM cenderung mengarah kepada model kemitraan Konjugasi. Mengapa demikian karena setelah UMKM mendapatkan pinjaman dari LKK kemudian usahanya berkembang dan mampu menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar.

b. Model kemitraan berdasar azas kehidupan organisasi pada umumnya

Sulistiyani (2004:130):

1) *Subordinate union of partnership*

Kemitraan ini terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki status, kemampuan atau kekuatan yang tidak seimbang satu sama lain.

2) *Linear union of partnership*

Kemitraan ini terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki persamaan secara relatif. Kesamaan tersebut dapat berupa tujuan, atau misi, besaran/volume usaha atau organisasi, status atau legalitas.

3) *Linear collaborative union of partnership*

Kemitraan jenis ini tidak membedakan besaran atau volume, status/legalitas, atau kekuatan para pihak yang bermitra. Yang menjadi tekanan utama adalah visi-misi yang saling mengisi satu dengan lainnya.

Berdasarkan model-model kemitraan di atas, kondisi yang terjadi pada kemitraan yang dilakukan oleh LKK dengan UMKM cenderung menganut model kemitraan *Linear collaborative union of partnership*. Kemitraan yang terjadi LKK dengan UMKM tidak memiliki besarnya usaha masing-masing, status usaha, dan juga kekuatan para pihak yang bermitra. Namun UMKM dan LKK ini memiliki visi dan misi yang saling mendukung.

Model-model kemitraan di atas sering kita jumpai di lingkungan masyarakat umum, ada kemitraan yang sehat yang saling menguntungkan, karena memiliki komitmen kuat dalam kerjasamanya agar mencapai hasil yang

maksimal, dan ada juga kemitraan yang tidak sehat artinya kemitraan tidak seimbang, maksudnya disalah satu pihak memiliki kekuatan yang tidak seimbang sehingga salah satu pihak tidak merasakan hasil yang atau keuntungan yang sama.

3. Pola Kemitraan

Menurut Partomo (2002:31-32), pola kemitraan usaha antara usaha besar dengan usaha kecil dan menengah, antara lain:

- a. Pola inti plasma adalah hubungan kemitraan antara UKM dengan usaha besar yang di dalamnya UKM bertindak sebagai inti dan UKM sebagai plasma. Perusahaan ini melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan modal, bimbingan teknis, dan pemasaran hasil produksi.
- b. Pola sub kontrak adalah hubungan kemitraan antara UKM dengan usaha besar, di mana UKM memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha besar sebagai bagian dari produksinya.
- c. Pola dagang umum adalah hubungan kemitraan antara UKM dan usaha besar, di mana usaha besar memasarkan hasil produksi UKM dan UKM memasok kebutuhan yang diperlukan usaha besar sebagai mitranya.
- d. Pola waralaba adalah hubungan kemitraan di mana usaha besar sebagai pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusinya kepada penerima waralaba (UKM) dengan disertai bantuan bimbingan manajemen.

- e. Pola keagenan adalah hubungan kemitraan dimana UKM memberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada usaha besar sebagai mitranya.

D. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

1. Pengertian dan Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

a. Usaha Mikro

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), usaha mikro didefinisikan sebagai usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha mikro memiliki beberapa kriteria yaitu:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Usaha Kecil

Usaha kecil menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah, kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik

langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Kriterianya yaitu:

- 1) Memiliki kekayaan bersih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Usaha Menengah

Berdasarkan Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah, usaha menengah diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Kriteria usaha menengah yaitu:

- 1) Memiliki kekayaan bersih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2. Karakteristik dan Peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Usaha Kecil dan Menengah memiliki beberapa karakteristik sebagaimana diungkapkan oleh Kuncoro (2000), yaitu: a) Tidak adanya pembagian kerja yang jelas antara bagian administrasi dan operasi. Kebanyakan dikelola oleh perorangan sebagai pemilik sekaligus pengelola, tenaga kerja dari keluarga dan kerabat sendiri; b) Rendahnya akses permodalan dari lembaga-lembaga kredit formal, sehingga menggunakan modal sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara bahkan renternir; c) Sebagian besar Usaha Kecil tidak mempunyai status badan hukum; d) Ditinjau dari golongan Industri, tampak hampir sepertiga bagian dari Usaha Kecil bergerak dalam bidang industri makanan, minuman, diikuti oleh kelompok industri galian bukan logam, tekstil dan kayu.

Usaha kecil dari tahun ke tahun terus berkembang dan dikembangkan terutama oleh para pengusaha golongan ekonomi menengah ke bawah. Keberadaan UMKM selain dapat mengurangi pengangguran juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat banyak daerah pedesaan menjadi tempat berdirinya usaha-usaha kecil. Menurut Wibowo (1996:2) peranan industri kecil adalah:

- a. Banyak menyerap tenaga kerja.
- b. Ikut menyelenggarakan peredaran perekonomian negara dan mampu hidup berdampingan dengan industri kecil.

- c. Usaha kecil dapat memegang peranan penting dalam menopang usaha besar.
- d. Dapat menyediakan bahan mentah, suku cadang, pembungkus, bahan pembantu dan sebagainya.
- e. Usaha kecil termasuk didalamnya industri kecil dapat berfungsi sebagai ujung tombak bagi usaha maupun industri besar dengan menyalurkan dan menjual hasil usaha besar kepada konsumen.

Menurut penjelasan di atas memang benar bahwa industri kecil selain berperan sebagai penopang industri-industri besar juga mampu menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi tingkat pengangguran.

3. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang dilakukan pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional melalui: a) Peningkatan ekonomi lokal dengan mengembangkan usaha dalam skala mikro dalam rangka peningkatan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah; dan b) Peningkatan produktifitas dan akses usaha kecil dan menengah pada sumber daya produktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk ekonomi daerah, sekaligus menciptakan lapangan kerja.

Menurut pedoman Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) yang merupakan pelaksanaan dari Tap MPR No.IV/MPR/1999 tentang GBHN 1999-2004, pengembangan UKM dapat dikembangkan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penciptaan iklim usaha yang kondusif

Penciptaan iklim bagi usaha mikro, kecil dan menengah yang kondusif bertujuan untuk membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, serta menjamin kepastian usaha dengan memperhatikan

kaidah efisiensi ekonomi sebagai prasyarat utama untuk berkembangnya UKM.

b. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif

Bertujuan untuk mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan serta meningkatkan daya saing UMKM.

c. Peningkatan Akses Kepada Sumberdaya Produktif

Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan UKM dalam memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumberdaya produktif (sumber daya manusia, modal, pasar, teknologi, dan informasi) terutama sumber daya lokal yang tersedia.

Jadi, berdasarkan penjabaran mengenai pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah diatas secara garis besar masalah yang dihadapi oleh usaha-usaha tersebut adalah (1) mengenai sumber permodalan; (2) memperoleh peluang pasar dan memperluas pasar; (3) organisasi dan manajemen sumberdaya manusia; (4) terbatasnya jaringan (*link*) usaha-usaha sejenis; (5) iklim usaha kurang kondusif (persaingan yang tidak sehat); dan (6) kurang maksimalnya pembinaan dan pelatihan.

4. Penyertaan Modal

Penyertaan modal adalah pemberian pinjaman dalam mengatasi masalah yang terjadi dan dalam waktu tertentu modal harus dikembalikan, penyertaan modal yang dilakukan pemerintah menurut Nirzawan (dalam Halim, 2004:68) mengemukakan bahwa dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah (PAD) menyangkut lima aspek yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Pertama, pengelolaan seluruh sumber yang mampu memberikan penerimaan, pendapatan, dan penghematan yang mungkin dilakukan.
- b. Kedua, ditetapkan oleh badan eksekutif dan legislatif, dilaksanakan oleh badan eksekutif dan diawasi oleh badan legislative.
- c. Ketiga, diarahkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.
- d. Keempat, didasari oleh prinsip-prinsip ekonomi, efisien, dan efektif.
- e. Kelima, adalah dokumentasi, transparansi, dan akuntabilitas.

E. Kemiskinan

1. Pengertian kemiskinan

Pengertian tentang kemiskinan menurut yang dikemukakan para ahli sangat beragam. Keragaman definisi tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang ideologis masing-masing penganutnya. Beberapa ahli yang mendefinisikan kemiskinan hanya dipandang dari segi ekonomi saja, antara lain SMERU (dalam Suharto dkk, 2004:6) yang mengemukakan bahwa kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non-material yang diterima oleh seseorang.

Adapun definisi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Departemen sosial (2002:4) yang mengemukakan bahwa kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.

Menurut Chambers (dalam Suryono, 2004:100), kemiskinan dianggapnya sebagai proses interaksi dari berbagai faktor yang muncul sebagai akibat dari situasi ketidakadilan, ketidakpastian, ketimpangan, ketergantungan dalam struktur masyarakat.

Jelas bahwa setinggi apapun tingkat pendapatan nasional perkapita yang dicapai suatu negara, selama distribusi pendapatan yang tidak merata maka tingkat kemiskinan di negara tersebut akan meningkat tajam. Berdasarkan konsep ini garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah. Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan karena secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kesehatan, moral, dan rasa harga diri dari masyarakat yang tergolong miskin.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai kemiskinan di atas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah sebuah kondisi dimana masyarakat berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, yang ditimbulkan oleh adanya ketidakadilan karena tidak meratanya distribusi pendapatan.

2. Macam-macam kemiskinan

Pada dasarnya kemiskinan itu dapat dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kartasmita (1996:10) mengungkapkan bahwa seseorang dikatakan miskin absolut apabila tidak mampu membiayai kebutuhan yang paling minimal untuk dapat hidup sesuai dengan martabat kemanusiaan. Kemiskinan relatif adalah perbandingan antara kelompok pendapatan masyarakat, yaitu antara kelompok yang miskin dan kelompok yang

tidak miskin, karena mempunyai tingkat pendapatan yang relatif tinggi daripada garis kemiskinan dan merupakan kelompok masyarakat yang relatif lebih maju.

Menurut Jamasi (2004:30, dalam Suryono dan Nugroho, 2008:46), ada empat bentuk kemiskinan, yaitu:

- a. Kemiskinan absolut, yaitu apabila tingkat pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum, antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
- b. Kemiskinan relatif, yaitu kondisi dimana pendapatannya berada pada posisi di atas garis kemiskinan, namun relatif lebih rendah daripada pendapatan masyarakat sekitarnya.
- c. Kemiskinan struktural, yaitu kondisi atau situasi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan dalam pembangunan.
- d. Kemiskinan kultural, yaitu mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, dan tidak kreatif meskipun pihak luar telah berusaha.

3. Ciri-ciri Kemiskinan

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007:155) menjelaskan beberapa ciri-ciri mengenai penduduk miskin, rumah tangga miskin dan variable kemiskinan sebagai berikut:

- a. Penduduk Miskin
 - 1) Penduduk dikatakan sangat miskin apabila kemampuan untuk memenuhi konsumsi makanan hanya mencapai 1.900 kalori per orang perhari plus kebutuhan dasar non-makanan, atau setara Rp 120.000,- per orang per bulan.
 - 2) Penduduk miskin dikatakan miskin apabila kemampuan untuk memenuhi konsumsi makanan hanya mencapai antara 1.900

sampai 2.100 kalori per orang per hari plus kebutuhan dasar nonmakanan atau setara Rp 150.000,- per orang per bulan.

- 3) Penduduk dikatakan mendekati miskin apabila kemampuan untuk memenuhi makanan hanya mencapai antara 2.100 sampai 2.300 kalori per orang per hari plus kebutuhan dasar non-makanan atau setara Rp 175.000,- per orang per bulan

b. Rumah Tangga Miskin

Apabila diasumsikan jumlah anggota rumah tangga (*household size*) sebuah rumah tangga rata-rata empat orang, batas kemiskinan rumah tangga adalah:

- 1) Rumah tangga dikatakan sangat miskin apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar sebesar $4 \times \text{Rp } 120.000 = \text{Rp } 480.000$ per rumah tangga per bulan.
- 2) Rumah tangga dikatakan miskin apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar sebesar $4 \times \text{Rp } 150.000 = \text{Rp } 600.000$ per rumah tangga per bulan, tetapi di atas Rp 480.000,-
- 3) Rumah tangga dikatakan mendekati miskin apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar sebesar $4 \times \text{Rp } 175.000 = \text{Rp } 700.000$ per rumah tangga per bulan, tetapi di atas Rp 600.000.

c. Variabel Kemiskinan

Variabel ini digunakan untuk menyatakan suatu rumah tangga dianggap layak atau tidak dikategorikan miskin sekaligus menentukan tingkat keparahan kemiskinan, yaitu:

- 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang.
- 2) Jenis lantai bangunan tempat tinggal terluas dari tanah/bambu/kayuوران.
- 3) Jenis dinding terluas dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plester.
- 4) Tidak punya WC.
- 5) Penerangan bukan listrik.
- 6) Air minum berasal dari sumur/mata air tak terlindung/sungai.
- 7) Bahan bakar untuk masak dari kayu/arang/minyak tanah.
- 8) Makan daging/susu/ayam maksimal 1 kali per minggu.
- 9) Membeli pakaian hanya 1 stel per tahun.
- 10) Hanya makan 1-2 x per hari.
- 11) Jika sakit tidak dapat berobat ke Puskesmas atau Poliklinik.
- 12) Penghasilan rendah atau pekerjaan hanya sebagai petani gurem.
- 13) Pendidikan kepala rumah tangga hanya lulusan SD atau tidak sekolah.
- 14) Tidak punya aset minimum sebesar Rp 500.000,- (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007:158).

4. Penyebab Kemiskinan

Menurut Bank Dunia, adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan antara lain:

a. Pendidikan

Kemiskinan memiliki kaitan yang sangat erat dengan pendidikan yang tidak memadai. Sama halnya dengan temuan di negara-negara lain, capaian jenjang pendidikan yang lebih tinggi berkaitan dengan konsumsi rumah tangga yang lebih tinggi pula. Selain itu, koefisien korelasi parsial pada umumnya lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan dengan di daerah pedesaan, baik bagi kepala rumah tangga maupun anggota keluarga lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga di daerah perkotaan memperoleh manfaat yang jauh

lebih besar dibandingkan dengan rumah tangga di daerah pedesaan untuk setiap tambahan tahun pendidikan.

b. Pekerjaan

Bekerja di sektor pertanian memiliki korelasi yang kuat dengan kemiskinan. Kepala rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian memiliki tingkat konsumsi yang jauh lebih rendah (dan karena itu memiliki kemungkinan lebih besar untuk menjadi miskin) dibandingkan mereka yang bekerja di sektor lain.

c. Gender

Meskipun tingkat kemiskinan terlihat sedikit lebih rendah pada rumah tangga dengan kepala keluarga perempuan, namun pada kenyataannya tidaklah demikian. Rumah tangga yang dengan kepala laki-laki masih jauh lebih beruntung dibandingkan rumah tangga dengan kepala keluarga perempuan.

d. Akses terhadap pelayananan infrastruktur dasar

Kemiskinan jelas berkaitan dengan rendahnya akses terhadap fasilitas dan infrastruktur dasar. Rumah tangga di daerah pedesaan yang memiliki lebih banyak akses kepada pendidikan sekolah menengah jauh lebih kecil kemungkinannya untuk menjadi miskin.

e. Lokasi Geografis

Dengan adanya ketimpangan antar wilayah tidaklah mengherankan apabila lokasi geografis juga berkorelasi dengan kemiskinan. Di samping wilayah yang sangat luas yang dimiliki

Indonesia, dimungkinkan untuk menggunakan teknik disagregasi geografis yang lebih baik untuk mengonfirmasi ketimpangan-ketimpangan tersebut dan memfokuskan upaya penanggulangan kemiskinan pada tingkat yang paling rendah.

Sumodiningrat (1997:15) membagi sebab-sebab kemiskinan menjadi 2 yaitu:

“Pertama, kemiskinan yang terjadi disebabkan oleh faktor-faktor eksternal atau faktor yang berada di luar jangkauan individu. Faktor ini secara konkrit lebih bersifat hambatan, kelembagaan atau struktur yang memang bias menghambat seseorang untuk meraih kesempatan-kesempatannya. Kedua, adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor internal yang berasal dari dalam diri seseorang atau lingkungannya. Kaum konservatif penganut pandangan ini melihat kemiskinan jenis ini terjadi sebagai akibat dari nilai-nilai dan kebudayaan yang dianut skelompok masyarakat jadi tidak bermula dari struktur sosial tetapi berasal dari karakteristik khas orang-orang miskin itu sendiri”.

Selain dari itu faktor lain yang menyebabkan pendapatan masyarakat sangat rendah sehingga masyarakat terbelenggu dalam lingkaran kemiskinan adalah faktor relatif tetap yaitu letak geografis dan daya dukung alam, atau faktor yang berkembang berupa keadaan sosial budaya yang menyangkut pengetahuan dan ketrampilan, adat istiadat situasi politik, dan kebijaksanaan penguasa.